

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa dampak signifikan pada sektor pemerintahan di seluruh dunia. E-Government, atau pemerintahan elektronik, merupakan salah satu bentuk implementasi TIK dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan (Abu-Faraj et al., 2023; Ameen et al., 2020). Penerapan E-Government bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas pemerintahan. Penerapan E-Government juga diharapkan dapat mengurangi birokrasi yang berlebihan, mempercepat akses terhadap informasi dan layanan publik, serta meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Alhassan et al., 2021; Alshamsi et al., 2019). Dengan adanya platform online dan sistem komunikasi elektronik, masyarakat dapat mengakses informasi pemerintahan, melakukan transaksi administrasi, memberikan masukan dan umpan balik, serta

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik dengan lebih mudah dan efektif (Stoica & Ghilic-Micu, 2021).

Menurut (Manoharan et al., 2021), perkembangan teknologi secara global telah menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pengembangan e-government. Namun, penerapan e-government tidaklah langsung diterima begitu saja, melainkan melalui serangkaian proses yang kompleks. Model e-government menjelaskan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas informasi, layanan, dan transaksi pemerintah secara online akan terus berlanjut. Pertumbuhan dan evolusi e-government di seluruh dunia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk privasi dan keamanan, kemanfaatan, konten, layanan, serta partisipasi dan keterlibatan masyarakat dan sosial.

Asia merupakan benua yang luas dengan keragaman budaya, politik, dan ekonomi yang signifikan. Negara-negara Asia memiliki latar belakang sejarah dan perkembangan yang berbeda, tetapi semuanya dihadapkan pada tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh transformasi digital dan persaingan global. Dalam konteks E-Government, berbagai negara di Asia telah mengadopsi

strategi dan inisiatif E-Government untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan publik (Kaya, 2020; Warf, 2014; Wu et al., 2020). Negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan Jepang telah menjadi pemimpin dalam mengembangkan sistem E-Government yang canggih dan terintegrasi. Mereka telah mengadopsi teknologi digital dan inovasi untuk menyediakan layanan publik yang mudah diakses dan memungkinkan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan pemerintah. Melalui portal online, aplikasi mobile, dan platform media sosial, warga negara dapat berinteraksi langsung dengan pemerintah, memberikan umpan balik, dan melibatkan diri dalam proses pembuatan kebijakan (Andita et al., 2022; Goede, 2019; Haneem et al., 2020; Rahman et al., 2020).

E-government hadir sebagai reformasi terhadap seluruh sistem administrasi di negara. e-government menjadi konsep yang terus dikembangkan oleh negara-negara di dunia yang tersebar luas di negara maju maupun negara berkembang (Akgul, 2018). Melalui EGDI (E-Government Development index) yang merupakan alat ukur diterapkan oleh PBB dalam mengukur kesiapan penerapan E

government disuatu negara dengan indikator pengukurnya yaitu *Online Service Index*, *indeks Infrastruktur Telekomunikasi*, *Human Capital Index*. Indikator Online Service Index mengukur tingkat ketersediaan layanan publik yang dapat diakses secara online. Ini mencakup berbagai jenis layanan yang disediakan oleh pemerintah dan dapat diakses melalui platform elektronik, seperti pendaftaran penduduk, pembayaran pajak, pengajuan izin, dan lain sebagainya. Indikator Telecommunication Infrastructure Index mengukur kesiapan infrastruktur telekomunikasi suatu negara, termasuk akses internet, penetrasi ponsel, dan ketersediaan jaringan broadband. Kesiapan infrastruktur ini menjadi faktor penting dalam memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan publik elektronik. Human Capital Index menilai tingkat keterampilan dan literasi digital masyarakat suatu negara. Ini mencakup kemampuan dan pengetahuan warga dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakses dan memanfaatkan layanan publik online (Setyobudi, 2017).

Sejak awal tahun 2000-an, penggunaan TIK dalam pemerintahan telah menjadi fokus utama bagi banyak negara

dalam upaya untuk memodernisasi sistem administrasi dan memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan. Dengan demikian, EGDI menjadi alat yang penting dalam mengukur sejauh mana suatu negara memanfaatkan teknologi untuk memenuhi tuntutan pelayanan publik di era digital (Kabbar, 2021). Indonesia mengalami kenaikan peringkat pada tahun 2020 E-government Rank Indonesia berada pada urutan ke 88 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan menduduki rank 77 dunia. Menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan pembangunan berdasarkan pada 3 indikator E-Government. Dalam wilayah Asia Tenggara Indonesia berada pada peringkat ke 5 dibawah Singapura, Malaysia, Thailand dan Brunei Darussalam berdasarkan pada survei tahun 2022.

**Table 1.1 Survey E-government Development Index Asia
Tenggara**

Negara	Survey tahun	E-Government Rank	E-Government Index
Singapore	2022	12	0.9133
Malaysia	2022	53	0.774
Thailand	2022	55	0.766
Brunei Darussalam	2022	68	0.727
Indonesia	2022	77	0.716
Viet Nam	2022	86	0.6787
Philippines	2022	89	0.6523
Cambodia	2022	127	0.5056
Myanmar	2022	134	0.4994
Timor-Leste	2022	147	0.4372
Laos	2022	159	0.3764

Sumber: United Nations E-Government Survey 2022

EGDI memiliki peran signifikansi penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dengan mengukur kesiapan dan efektivitas e-government, indikator ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu negara mampu memanfaatkan potensi teknologi untuk mempercepat pencapaian

tujuan-tujuan pembangunan, termasuk di antaranya adalah peningkatan akses terhadap layanan publik, penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam proses demokratis. Selain itu, EGDI juga memainkan peran penting dalam membantu negara-negara untuk membandingkan kemajuan mereka dengan negara-negara lain di seluruh dunia, mendorong persaingan sehat dalam penerapan e-government, dan merangsang inovasi dalam penggunaan teknologi untuk kepentingan publik (Sudirman & Saidin, 2022). Negara berkembang dan negara maju memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal penerapan E-Government. Negara maju sering kali memiliki skor yang lebih tinggi dalam EGDI, menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menerapkan E-Government (Rahman et al., 2020).

Melihat perkembangan E government yang begitu signifikan di seluruh dunia, Pemerintah telah menghadirkan Perpres no 5 tahun 2018 tentang SPBE. Hadirnya perpres ini menjadi landasan untuk mengembangkan E-government di Indonesia. SPBE merupakan pemanfaatan teknologi informasi

dalam koneksi kepada masyarakat yang mengutamakan efektif, bersih dan transparan. Konsep dasar dari SPBE yaitu (G2G) pemerintah ke organisasi pemerintah, (G2C) pemerintah ke warga negara, (G2E) pemerintah ke karyawan, dan (G2B) pemerintah ke bisnis (Stoica & Ghilic-Micu, 2021). Dimensi G2C merupakan komponen yang paling penting karena setiap keputusan yang pemerintah buat harus mempertimbangkan bersama warga negara (Janureksa et al., 2022).

Dengan memberi warga akses yang lebih besar dan memudahkan interaksi antara warga dan pemerintah, e-government membantu memperluas demokrasi (Lee-Geiller & Lee, 2019). Meskipun banyak negara di seluruh dunia menginginkan demokrasi, beberapa menghadapi kesulitan dalam membangun dan mempertahankan sistem demokrasi yang kuat, tetapi kemajuan teknologi informasi dan internet telah memainkan peran penting dalam proses demokrasi di banyak negara (Aziz & Hasna, 2020; Xu et al., 2022). Namun, dalam pemerintahan demokratis, interaksi antara wakil rakyat dan warganya menjadi fokus utama. Ini karena pemerintahan demokratis memberikan

warga kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan, pembangunan, dan pelayanan (Dedi, 2021). E-government memungkinkan warga negara untuk mengakses layanan publik, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mendapatkan informasi tentang pemerintah. Ini dapat membantu memperkuat demokrasi dan mendorong sistem demokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Ariyanti et al., 2021).

Dalam konteks global yang didominasi oleh keinginan banyak negara untuk mewujudkan demokrasi, penting untuk diingat bahwa tingkat demokrasi dalam suatu negara tidaklah tetap dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor (Jati, 2021; Tomala & Zajęcki, 2019). Untuk memahami dan mengevaluasi tingkat demokrasi suatu negara, banyak lembaga dan organisasi mengandalkan alat evaluasi yang kredibel, seperti Indeks Demokrasi, yang disusun oleh Economist Intelligence Unit. Indeks ini menggabungkan berbagai faktor penting dalam menilai demokrasi yang dijelaskan dalam beberapa aspek, seperti *electoral process and pluralism, civil liberties, the functioning of*

government, political participation, dan political culture. Indeks ini memberikan gambaran tentang seberapa demokratis suatu negara dan seberapa baik pemerintahannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Economist Intelligence Unit, 2022; Laishram & Kumar, 2021). Berdasarkan survei dari EIU (Economist Intelligence Unit) di negara negara pada wilayah asia tenggara di tahun 2022, indonesia berada pada urutan ke empat di bawah Malaysia, Timor Leste dan Filipina dengan skor 6,71.

Tentunya dengan adanya E-Government atau pemerintahan elektronik sistem pemerintahan yang mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan publik dan meningkatkan efisiensi birokrasi. E-Government dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan mempercepat penyelesaian masalah. Namun, niat untuk mengadopsi E-Government adalah faktor kunci dalam kesuksesan implementasi sistem ini. Keterlibatan aktif masyarakat dan pihak terkait, seperti pegawai pemerintah, dalam menerima dan menggunakan layanan elektronik menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan

adopsi tersebut. Selain itu, aspek-aspek seperti literasi digital, ketersediaan infrastruktur teknologi, dan persepsi terhadap manfaat yang diperoleh dari E-Government juga memiliki dampak yang signifikan pada niat adopsi (Oktavia, 2020; A. Purwanto & Susanto, 2018). Kenyataan di lapangan adalah bahwa sebagian besar inisiatif layanan e-government di negara berkembang masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemerintah daerah berharap masyarakat lebih terlibat dalam e-government, terutama dalam hal layanan transaksi. Tingkat adopsi layanan e-government bergantung pada seberapa banyak layanan ini digunakan oleh masyarakat (Bisma, 2017). Saat ini, pengembangan e-government di Indonesia masih terfokus pada pengembangan sistem e-government; namun, banyak pihak pemerintah belum melakukan evaluasi atau pengukuran tentang seberapa sukses layanan e-government dan seberapa besar penerimaannya oleh pengguna (Muftikhali & Susanto, 2017).

Niat untuk mengadopsi E-government di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan juga berada pada tingkat rendah. Terlihat pada portal website resmi milik pemerintah Kabupaten

Kotabaru yaitu Kotabarukab.go.id pada website tersebut tidak semua dinas atau instansi pemerintahan terintegrasikan. Dan beberapa dinas lainnya belum menerapkan E-government. Hal-hal tersebut dapat dipengaruhi oleh minat masyarakat kotabaru untuk mengandalkan e-government dalam mendapatkan pelayanan. Kepercayaan masyarakat yang menggunakan e-government terhadap sistem yang disediakan pemerintah merupakan komponen penting dari penggunaan e-government (Hartanti et al., 2021).

Keberhasilan implementasi E-Government tidak hanya bergantung pada infrastruktur teknologi yang canggih, melainkan juga pada partisipasi dan penerimaan masyarakat terhadap teknologi ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor apa yang mempengaruhi niat individu dalam mengadopsi E-Government di Kabupaten Kotabaru. Teori TPB (Theory of Planned Behavior) Teori ini menjelaskan mengenai kepercayaan serta risiko yang dapat mempengaruhi individu berminat atau mempunyai keinginan untuk menggunakan teknologi. TPB dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi

niat adopsi e-government di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Teori ini menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku (Alhadid et al., 2022; Zahid & Din, 2019). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku terhadap niat adopsi e-government di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Selain itu, penerapan pemerintahan elektronik dapat berdampak pada demokrasi di Kotabaru yaitu dalam bentuk partisipasi masyarakat, atau transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat, memahami hubungan antara penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan tingkat demokrasi di Kabupaten Kotabaru merupakan hal penting.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penelitian ini dilakukan guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat adopsi E-Government di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan

Selatan, serta untuk menilai dampak adopsi E-Government terhadap tingkat demokrasi di daerah tersebut. Dalam konteks penelitian kuantitatif ini, rumusan masalah dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Sejauh mana sikap, norma dan kendali perilaku memengaruhi adopsi e government di Kabupaten Kotabaru?
2. Sejauh mana adopsi e-government mempengaruhi partisipasi publik di Kabupaten Kotabaru?
3. Sejauh mana adopsi e-government mempengaruhi akuntabilitas pemerintah di Kabupaten Kotabaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Adopsi E-Government dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor psikologis, sosial, dan teknis yang mempengaruhi niat individu untuk mengadopsi E-Government di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana adopsi E-Government mempengaruhi partisipasi masyarakat

dalam proses politik dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kotabaru.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya kajian keilmuan yang berkaitan dengan E-Government dan Demokrasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi kebijakan Kabupaten Kotabaru, khususnya sebagai pertimbangan untuk meningkatkan minat warga masyarakat yang menggunakan E-Government dan dapat memperkuat demokrasi di daerah.